

## BAB 2

### PERJALANAN KONFLIK KOREA UTARA (DPRK) – KOREA SELATAN (REPUBLIC OF KOREA): DARI PERANG KOREA HINGGA DIPLOMASI

#### 2.1 Sejarah Singkat Perang Korea (25 Juni 1950 – 27 Juli 1953)

Perang Korea dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1953. Perang ini diawali ketika tentara Korea Utara secara mengejutkan melakukan serangan pada hari minggu, tanggal 25 Juni 1950 waktu Korea. Permasalahan utama perang dua negara saudara tersebut adalah tidak adanya titik temu antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat mengenai masa depan semenanjung Korea. Dua kekuatan tersebut memainkan peranannya masing-masing sebagai pemenang perang dunia II di semenanjung Korea yang memang sebelumnya diduduki oleh fasisme Jepang. Wilayah semenanjung Korea yang mempunyai peradabannya sendiri dibawah kekuasaan Dinasti Korea, tepatnya dinasti *Joseon* (1392-1910) yang tunduk dibawah kekuasaan dinasti *Qing* dari Cina.<sup>35</sup>

Pada awalnya wilayah semenanjung Korea inipun telah diduduki oleh Jepang pada awal tahun 1900-an. Jepang berhasil menduduki wilayah semenanjung Korea setelah mengalahkan Rusia dalam *Russo-Japanese War* (Februari 1904-September 1905)<sup>36</sup> dan Jepang membuat kesepakatan di *Eulsa Treaty* pada tanggal 17 November 1905 dengan Korea, serta menjadikan wilayah semenanjung Korea sebagai wilayah protektorat Jepang. Perjanjian ini memperkuat kedudukan Jepang di wilayah semenanjung Korea. Jepang terus menduduki Korea dalam upayanya memperluas kekuasaan fasisme-nya di perang Asia Timur Raya (*Dai Toa No Senso*) yang sebelumnya Korea berhasil memproklamkan kemerdekaannya dari pendudukan Jepang di tahap I

---

<sup>35</sup> Samuel Hawley, *The Imjin War: Japan's Sixteenth Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China*, Seoul: The Royal Asiatic Society, 2005, h. 195.

<sup>36</sup> The Russo-Japanese War Research Society, *op.cit.*

pada tanggal 1 Maret 1919<sup>37</sup> melalui gerakan kemerdekaan rakyat Korea bersatu. Korea di periode tersebut telah memiliki kesadaran nasionalisme untuk mengusir penjajah Jepang yang telah melakukan okupasi di wilayah semenanjung Korea selama sepuluh tahun. Meskipun gerakan nasionalis tersebut dapat dipatahkan oleh Jepang dan gagal menjadi gerakan kemerdekaan, namun tanggal tersebut tetap diperingati sebagai titik tolak kesadaran nasionalisme Korea oleh bangsa Korea sendiri. Para pejuang Korea tersebut terus berusaha mendirikan pemerintah provisional Korea yang dibentuk untuk melakukan tindakan reaksioner terhadap Jepang.<sup>38</sup>

Pemerintah provisional Korea dibentuk oleh para pemimpin nasional Korea seperti Syngman Ree, Yi Tong-hwi, An Ch'ang-ho dan Kim Ku. Para pemimpin tersebut membawa isu kemerdekaan Korea ke wilayah Cina, dan mendeklarasikan pembentukan pemerintahan tersebut di Shanghai pada bulan April 1919. Pada tahun 1922, semua kelompok dari berbagai aliran yang melakukan tindakan resistensi terhadap Jepang bersatu dibawah kepemimpinan pemerintah provisional Korea, yang dimana Syngman Ree menjadi presidennya dan Yi Tong-hwi yang berpaham komunis diangkat menjadi perdana menterinya. Kelak, Yi membantu Uni Soviet melakukan operasi revolusioner di Manchuria dan Kim Ku mendekati pemimpin sayap kanan nasionalis Cina, yaitu Chiang Kai-sek. Hingga perang dunia II berakhir dan membuat wilayah semenanjung Korea terbebas dari belenggu pendudukan Jepang, para pemimpin pemerintah provisional Korea dan beserta para anggotanya kembali ke semenanjung Korea. Semenjak kekalahan Jepang di perang dunia II tersebut, wilayah-wilayah bekas pendudukan Jepang mengalami *Vacuum of Power*, tidak terkecuali wilayah yang dinamakan semenanjung Korea. Kelompok-kelompok yang melakukan tindakan resistensi terhadap pendudukan Jepang kembali mengambil alih wilayah-wilayah yang selama ini menjadi asal pengaruh mereka. Seperti kelompok yang beraliran komunis kembali menduduki wilayah utara begitupula dengan pemerintahan

---

<sup>37</sup> William Stueck, *The Korean War: an International History*, New Jersey: Princeton University Press, 1999, h. 14-15. Lihat juga Asian Info.org March 1<sup>st</sup> Independence Struggle, [http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history/march\\_1st\\_independence\\_struggle.htm](http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history/march_1st_independence_struggle.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

<sup>38</sup> William Stueck, *Ibid.*, h. 14-15.

provisional Korea pimpinan Syngman Ree yang menduduki wilayah selatan semenanjung Korea.<sup>39</sup> Cita-cita reunifikasi sebenarnya telah tercipta ketika berbagai kekuatan dari berbagai aliran di dalam bangsa Korea memproklamkan pemerintah provisional Korea dan bersama-sama berupaya mengusir Jepang dari wilayah semenanjung Korea, namun semua hal tersebut sirna ketika para kekuatan asing pemenang perang dunia II melakukan intervensi dan membagi jatah wilayah kemenangan perang dunia II, termasuk wilayah semenanjung Korea, yang dimana Uni Soviet mempengaruhi wilayah utara dan Amerika Serikat mempengaruhi wilayah selatan semenanjung Korea dengan pemahaman dan ideologinya masing-masing. Uni Soviet dan Amerika Serikat berusaha membentuk pemerintahan administrasi masing-masing wilayah yang akhirnya tercipta dengan *Democratic People of Republic Korea* yang dikenal dengan Korea Utara dan *Republic of Korea* yang dikenal dengan sebutan Korea Selatan. Pemisahan kekuasaan pemerintah administrasi ini sendiri diketahui dan dibawah arahan PBB, hal ini dilakukan karena tidak adanya titik temu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan amanat PBB (penyatuan) terhadap wilayah Korea.<sup>40</sup>

Pertempuran pertama kali berlangsung ketika Korea Utara untuk pertama kalinya melakukan serangan ke wilayah Korea Selatan. Dalam serangan tersebut sangat terlihat keunggulan Korea Utara dalam berbagai lini bila dibandingkan dengan Korea Selatan. Korea Utara yang memang didukung sepenuhnya oleh pihak Uni Soviet dalam bidang persenjataan melakukan serangan dari darat dan udara. Korea Selatan terlihat tidak dapat menandingi kekuatan Korea Utara tersebut, hal ini dikarenakan pada masa itu, Korea Selatan masih belum mempunyai persenjataan dan kekuatan pertahanan yang cukup untuk menandingi kekuatan Korea Utara. Korea Selatan pada masa itu tidak sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat dalam berbagai hal, termasuk dalam militer dan persenjataan. Hal ini dikarenakan pada masa itu, Amerika Serikat tidak sepenuhnya memberikan perhatian terhadap kawasan semenanjung Korea, terutama Korea Selatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka ketika

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 26-27. Lihat juga Chris Trueman, *The United Nations and the Korean War*, [http://www.historylearningsite.co.uk/united\\_nations\\_korean\\_war.htm](http://www.historylearningsite.co.uk/united_nations_korean_war.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2009. Lihat Lampiran A (Peta Semenanjung Korea).

Amerika Serikat turut menjadi *trigger* pembentukan *Republic of Korea*. Amerika Serikat juga pada masa itu terlihat belum melihat signifikansi pentingnya semenanjung Korea. Sedangkan dari sisi Korea Utara yang terus didorong oleh kekuatan ideologi komunis Uni Soviet ingin sekali melakukan proses penerapan ideologi komunis secara keseluruhan di kawasan semenanjung Korea yang memang diharapkan oleh Uni Soviet dan Cina.<sup>41</sup>

Dalam melakukan serangan balasan, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Harry S. Truman terlihat lambat dalam mengambil keputusan untuk mendukung Korea Selatan di pertempuran semenanjung Korea. Bahkan yang mengambil inisiatif terlebih dahulu dalam membalas serangan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut adalah Jenderal Douglas MacArthur yang bertindak sebagai komandan pertahanan Amerika Serikat yang berkedudukan di Tokyo. Tindakan MacArthur tersebut dilakukan, terutama untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan semenanjung Korea. Namun tanpa dukungan kekuatan yang memadai dari Washington yang lambat dalam mengambil keputusan, serangan balasan yang diperintahkan MacArthur dari Tokyo tetap tak sanggup menandingi kekuatan Korea Utara yang didukung oleh persenjataan Uni Soviet, dan pada tanggal 27 Juli 1953, pihak Amerika Serikat menyatakan untuk melakukan gencatan senjata mengenai pertempuran selama tiga tahun tersebut dan mengakui keunggulan Korea Utara. Tanggal tersebut hingga kini terus dikenang oleh seluruh warga negara Korea Utara akan kemenangan dalam perjuangannya melawan pasukan Amerika Serikat yang terjadi selama Perang Korea. Persetujuan gencatan senjata antara Korea Utara dengan Amerika Serikat secara penuh mengakhiri Perang Korea yang telah berlangsung sejak tahun 1950.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> William Stueck, *op.cit.*, h. 3-9. Lihat Lampiran B (Peta Alur Serangan Pertama Korea Utara Terhadap Wilayah Korea Selatan Pada Tanggal 25 Juni 1950).

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 11.

## 2.2 Perpecahan di Semenanjung Korea

Semenanjung Korea, semenanjung yang pernah dianggap selalu mengalami kesialan dalam perspektif historisnya. Telah banyak kejadian di beberapa abad dan tahun sebelumnya yang mampu melahirkan Korea seperti di abad saat ini. Korea yang terpecah, Korea yang terbagi dua berdasarkan ideologi. Semenanjung ini telah mengalami empat kali pendudukan yang dilakukan oleh bangsa lain, yaitu Cina, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat; serta pernah juga merasakan sekitar 900 invasi dalam perjalanan sejarah semenanjung ini. Kesialan-kesialan itulah yang telah mereka alami selama hampir ratusan tahun lamanya. Dapat dikatakan, bangsa Korea secara historis merupakan bangsa yang telah diberikan hadiah untuk bertetangga dengan para pemilik kekuatan didunia ini. Namun walau bagaimanapun, dalam perjalanannya Amerika Serikat-lah yang telah membuat semenanjung Korea memiliki banyak dinamika yang dapat dipelajari.<sup>43</sup>

Hubungan pertama Amerika dengan bangsa Korea adalah dengan kerajaan Hermit, dan hubungan pertama tersebut adalah suatu pertemuan yang cukup mengesankan bagi kerajaan Hermit. Hubungan dengan Amerika Serikat pada pertama kali ini dianggap mereka cukup membantu dalam mempertahankan diri dari tetangga-tetangga besarnya. Bahkan raja (Korea) Hermit sangat senang dengan kedatangan Amerika Serikat dan hubungan mereka dengan bangsa tersebut. Tetapi hal tersebut sesungguhnya terlalu prematur untuk dianggap sebagai suatu keberkahan bagi bangsa Korea, karena dalam beberapa tahun selanjutnya, Washington (Amerika Serikat) sesungguhnya akan menjual pertemanan baru mereka dengan bangsa Korea.<sup>44</sup> Seperti halnya dengan bangsa Jepang dan Rusia yang juga memiliki ketertarikan untuk melakukan kontrol terhadap Korea. Akan tetapi, setelah kemenangan Jepang dalam *Russo-Japanese War* di tahun 1904-1905,<sup>45</sup> bangsa (Jepang) ini justru memiliki kemampuan untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah bangsa Korea.

---

<sup>43</sup> Roland Bleiker, *Divided Korea: Toward a Culture of Reconciliation*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005, h. 6-9.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 7-8

<sup>45</sup> The Russo-Japanese War Research Society, <http://www.russojapanesewar.com/phil-1.html>

Dalam masa pendudukan tersebut, Jepang berusaha melenyapkan budaya-budaya Korea dan menanamkan pengaruh kebudayaan Jepang. Pengaruh mereka lakukan dengan cara penggunaan nama-nama Jepang di diri individu bangsa Korea serta upaya penghapusan bahasa Korea. Jepang juga menanamkan pengaruh kepercayaan Shinto, serta memberikan pengajaran baru mengenai sejarah bangsa Korea kepada anak-anak kecil bangsa Korea. Jutaan pria dan wanita bangsa Korea benar-benar dibuat untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap mereka, banyak dari mereka juga yang diajak Jepang untuk turut serta membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya (*Dai Toa No Senso*). Bangsa Korea benar-benar dibuat loyal kepada kaisar yang berada di Tokyo.<sup>46</sup>

Namun ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Korea yang sempat mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari pendudukan bangsa asing berdasarkan pada Deklarasi Kairo di tahun 1943 justru pada tahun 1945 kembali mengalami aneksasi dari Uni Soviet yang mempunyai pengaruh Komunis dan Amerika Serikat yang mempunyai pengaruh liberal. Uni Soviet mencoba mempengaruhi bagian utara dan Amerika Serikat menanamkan pengaruh di bagian selatan, dan mulai saat itulah perpecahan di semenanjung Korea terjadi.<sup>47</sup>

Bagi Korea Utara, ideologi komunis adalah sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Bahkan Korea Utara mempunyai penyesuaian tersendiri terhadap ideologi komunis yang berdasarkan ajaran Marxisme dan Leninisme. Ajaran dan ideologi tersebut dinamakan ajaran *Juche*<sup>48</sup> yang diterapkan secara menyeluruh oleh pemimpin besar Korea Utara pada masa itu, yaitu Kim Il-sung melalui Partai

---

diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

<sup>46</sup> Gordon G. Chang, *Nuclear Showdown: North Korea Takes on The World*, London: Hutchinson, 2007, h. 4-5.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Juche* adalah ideologi dan pemahaman akan *Self Reliance* yang berdasarkan pada pemahaman akan sosialisme dan ditanamkan oleh mantan Presiden Kim Il-sung kepada seluruh rakyat Korea Utara dan wajib diterapkan pada semua sendi kehidupan. Lihat The Official Webpage of Democratic People's of Republic of Korea, <http://www.korea-dpr.com/koreajuche.htm> diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

Pekerja Korea (PPK) yang didirikannya pada tanggal 10 Oktober 1945.<sup>49</sup> Bagi Kim Il-sung, sejak awal periode revolusi dan pemerintahan yang dipimpinnya telah diajarkan bahwa revolusi di bidang ideologi berada di atas segala pekerjaan.<sup>50</sup> Sejak tahun 1992, *Juche* dianggap sebagai ajaran asli Korea yang tidak meniru Marxisme-Leninisme atau ajaran asing lainnya. Ajaran ayah dari Kim Jong-il ini menjadi pegangan wajib bagi setiap pejabat partai, pemerintah, militer dan seluruh rakyat Korea Utara. Bahkan selain di dalam negeri, penguasa Korea Utara juga terus berusaha untuk menanamkan ajaran-ajaran tersebut diluar negeri Korea Utara,<sup>51</sup> dan sejak tanggal 9 September 1997 Korea Utara memberlakukan tahun *Juche* patokan tanggal kelahiran Kim Il-sung yakni 15 April 1912 sebagai tahun kesatu, sedangkan tanggal dan bulan tetap mengikuti sistem penanggalan masehi.<sup>52</sup>

Demikian pula halnya dengan Partai Pekerja Korea yang terbukti berhasil menempatkan ideologi sebagai dasar kekuatannya dalam menggerakkan pembangunan bangsa. Partai Pekerja Korea berhasil melakukan gerakan umum bagi mobilisasi ideologi yang juga menjadi momentum utama dalam mengawali gerakan tersebut sehingga menciptakan kemajuan bagi pembangunan sosialis pasca perang Korea. Di samping itu, Presiden Kim Il-sung telah meletakkan teori mengenai ideologi yang menentang gagasan bahwa gerakan massa merupakan faktor utama dalam revolusi dan pembangunan. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan memegang teguh pada ideologi sebagai salah satu tonggak dalam mendirikan negara yang kuat, maka pada gilirannya negara akan mencapai kejayaannya.<sup>53</sup>

Dengan kebijakan itu maka rakyat Korea Utara hanya diperkenankan mengenal satu kebudayaan yang sejalan dengan ideologi partai dan negara, dan kebudayaan tersebut dianggap oleh Korea Utara sebagai kebudayaan asli (*juche*). Akibatnya adalah pengaruh kebudayaan asing di Korea Utara dapat dikatakan

---

<sup>49</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (operasional)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2000, h. 10.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>51</sup> The Official Webpage of Democratic People's of Republic of Korea, *op.cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000, op.cit.*, h.20.

hampir tidak ada dan bahkan muncul penolakan terhadap kebudayaan asing tersebut. Mengingat bahwa kegiatan sosial dan budaya merupakan salah satu sasaran propaganda dan pelaksana kepentingan negara, maka aktivitas seni, budaya dan olahraga tetap diutamakan dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan kualitas disamping kuantitas. Oleh karena itulah maka kegiatan festival seni besar-besaran dalam perayaan *The Sun's Day* dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya propaganda kepentingan nasional baik yang ditujukan sebagai komsumsi ke dalam negeri maupun luar negeri.<sup>54</sup>

Pada periode tahun 1999, salah satu penyebab terjadinya perpecahan adalah adanya masa kejayaan bagi angkatan bersenjata Korea Selatan, karena jika pada masa-masa periode sebelumnya angkatan bersenjata Korea Selatan dapat menangkap 2 kapal selam Korea Utara secara kebetulan, seperti secara kebetulan berhasil menangkap kandasnya kapal selam Korea Utara di pantai Kangneung dan penangkapan kapal selam Korea Utara lainnya karena terjerat jaring kapal ikan nelayan Korea Selatan di sekitar perairan Sokcho. Akan tetapi pada periode milenium baru ini, angkatan bersenjata Korea Selatan yang dalam hal ini merupakan angkatan laut Korea Selatan berhasil menenggelamkan 1 kapal angkatan laut Korea Utara yang telah beberapa kali melanggar *Northern Limit Line* (NLL), dan pada periode secara singkat terjadi peningkatan pada bidang persenjataan angkatan laut Korea Selatan yang mempunyai peralatan lebih modern dengan personil yang lebih tertatih dari periode tahun-tahun sebelumnya.<sup>55</sup>

Walaupun demikian, usaha dalam mengejar peningkatan persenjataan Korea Utara dilakukan oleh Korea Selatan dengan melakukan pengeluaran yang sangat besar dibidang militernya. Meskipun doktrin militer dan struktur kekuatan Korea Utara berorientasi ofensif bila dibandingkan dengan Korea Selatan yang lebih cenderung defensif, namun kehadiran kekuatan militer tersebut melakukan kompensasi dalam munculnya perbedaan tersebut. Berdasarkan perkiraan terakhir *Institute of International and Strategic Studies* di London, Angkatan Darat Korea Utara melebihi 784.500 yang merupakan 3,8% penduduk, sedangkan Korea

---

<sup>54</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2001, h. 10-11.

<sup>55</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, Seoul: KBRI Seoul, h. 31.

Selatan dengan jumlah 622.000 yang merupakan 1,3% dari jumlah penduduknya.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, Korea Utara menempatkan setengah dari pasukan tempurnya di daerah *Demilitarized Zone* (DMZ). Menurut pengakuan Amerika Serikat pada tahun 1983, Korea Utara mengeluarkan 25% GNP-nya untuk keperluan bidang militernya, sedangkan Korea Utara sendiri hanya 6% dari GNP-nya. Dalam tiga tahun terakhir Korea Utara mempercepat program militerisasinya untuk memproduksi tank yang berasal dari Uni Soviet dengan tipe T-26, memperoleh pesawat A-7 produksi Cina serta memproduksi pesawat tiruan bertipe MIG-21. Selain itu Korea Utara juga melakukan peningkatan pada angkatan lautnya dengan menambahkan 500 kapal tempur atau perusak, 21 kapal selam serta menambahkan kapal-kapal yang dilengkapi dengan peluru-peluru jarak jauh. Pada saat itu pasukan Korea Utara mampu melakukan serangan terhadap Korea Selatan, bahkan tanpa bantuan dari Cina dan Uni Soviet sendiri. Sedangkan pada saat itu, Korea Selatan sendiri mengalami penurunan bantuan dari Amerika Serikat. Perangkat defensif Korea Utara sendiri, seperti Tank dan Artileri bahkan dibuat didalam negeri mereka sendiri. Dalam hal ini, pihak Korea Utara dapat dikatakan lebih kuat dari Korea Selatan, mereka (Korea Utara) bahkan melengkapi perangkat defensifnya tersebut dengan kepentingan agar dapat melakukan *Blitzkrieg* terhadap pihak Korea Selatan, dengan tujuan utama mendobrak garda depan wilayah DMZ dan Seoul. Bahkan Amerika Serikat terus memprovokasi keadaan tersebut dengan mengatakan bahwa Korea Utara masih terus meningkatkan jumlah satuan artilerinya dengan peralatan-peralatan yang lebih berat. Menurut pengakuan Amerika Serikat pada saat itu, jumlah kekuatan Korea Utara tersebut merupakan tiga perempat dari jumlah artileri yang dimiliki Amerika Serikat dan ditempatkan diseluruh dunia.<sup>57</sup>

Korea Utara juga mempunyai pasukan komando dengan jumlah sedikitnya 100.000 personil yang dapat dengan cepat dipindahkan menggunakan 100 kapal pendarat berkecepatan tinggi. Korea Utara juga memiliki kapal transportasi militer

---

<sup>56</sup> Robert Scalapino, Seizaburo Sato, Jusuf Wanandi (ed.), *Masalah Keamanan Asia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990, h. 171.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 171-172.

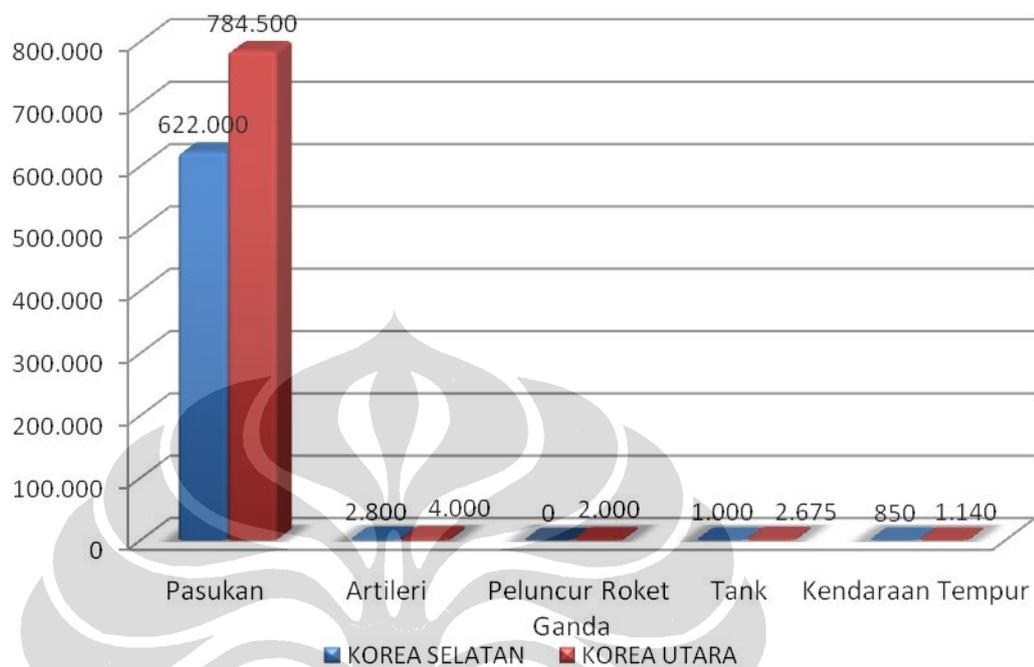
bertipe A-2 yang dapat melalui terowongan bawah tanah mereka untuk dapat menerobos jauh ke wilayah Korea Selatan. Dan lebih hebatnya lagi, Korea Utara pada masa ini mampu menghancurkan atau mengacaukan jaringan komando dan komunikasi lawan yang sekaligus saudaranya tersebut. Kekuatan pasukan komando gerak cepat ini juga tercatat mampu melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat terorisme, seperti yang mereka lakukan di tahun 1968 dengan menyerang kediaman presiden Korea Selatan serta melakukan percobaan pembunuhan terhadap presiden Korea Selatan yang lain di kota Rangoon pada Oktober 1983. Selain kekuatan angkatan bersenjata yang dalam hal ini telah dijelaskan bertipe angkatan darat. Korea Utara juga mengungguli Korea Selatan dalam angkatan laut dan udara dengan jumlah kuantitas yang lebih besar. Perbandingan diantara keduanya tercatat, Korea Utara memiliki 500 kapal tempur, sedangkan Korea Selatan hanya 100 kapal tempur. Korea Utara memiliki 21 kapal selam berikut kapal patroli yang mempunyai peluru kendali, sedangkan Korea Selatan hanya memiliki 8 kapal perusak peninggalan Amerika Serikat di masa perang dunia II. Korea Utara memiliki 740 pesawat tempur, sedangkan Korea Selatan hanya memiliki 450 pesawat tempur.<sup>58</sup> Pada tahun 1983 ini, persaingan kekuatan militer kedua Korea meningkat tajam, ditandai dengan semakin sering keduanya terlibat dalam konflik terbuka. Persaingan ini tentunya semakin memperbesar jurang pemisah dan semakin kuatnya perpecahan diantara keduanya. Perbandingan dan perimbangan kekuatan tiga angkatan bersenjata Korea Utara dan Korea Selatan pada periode 1980-an dapat dilihat pada grafik dihalaman selanjutnya.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 172.

Grafik 2.2.1

**Perbandingan Kekuatan Angkatan Darat Korea Utara dan Korea Selatan  
Pada Periode 1983-1984<sup>59</sup>**



Grafik 2.2.2

**Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut Korea Utara dan Korea Selatan  
Pada Periode 1983-1984<sup>60</sup>**



<sup>59</sup> Korea Herald, 3 Februari 1984; *The Military Balance*, 1983-1984, h. 93-94. Lihat Juga Yoong Ko-cha, Kang Choi, *South Korea Defense Posture*, Seoul: JFQ Forum, Spring 1995, h. 30.

<sup>60</sup> *Ibid.* Lihat Juga Yoong Ko-cha, Kang Choi, *ibid.*

**Grafik 2.2.3**  
**Perbandingan Kekuatan Angkatan Udara Korea Utara dan Korea Selatan**  
**Pada Periode 1983-1984<sup>61</sup>**



Peningkatan kemampuan angkatan bersenjata Korea Selatan pada periode milenium baru dapat terlaksana, karena pada periode ini Korea Selatan sudah dapat menyelesaikan krisis ekonominya dengan baik dalam waktu yang cukup singkat. Dengan pulihnya keadaan ekonomi Korea Selatan tersebut, maka Korea Selatan dapat melanjutkan kembali mega proyek modernisasi militer yang mulai dijalankan pada periode tahun 1970-an tersebut, namun tertunda karena krisis ekonomi yang menimpa mereka. Mega proyek modernisasi yang tertunda itu, seperti proyek pembangunan kapal selam (SSU)<sup>62</sup> dan proyek kapal perusak (KDX).<sup>63</sup> Proyek-proyek ini terus dikembangkan, mengingat angkatan bersenjata Korea Selatan masih melihat keadaan dilapangan yang kurang lebih 60% dari pasukan kedua negara masih tersebar disepanjang garis perbatasan, kendati dibidang politik kedua negara telah mengalami banyak kemajuan, seperti telah disetujuinya pembicaraan antara kedua pemimpin Korea di ibukota Korea Utara, Pyongyang pada tanggal 12-14 Juni 2000.<sup>64</sup>

Persaingan kedua Korea di periode tahun 1999, yang merupakan tahun meningkatnya ketegangan dalam hubungan keduanya terlihat dari kekuatan

<sup>61</sup> *Ibid.* Lihat Juga Yoong Ko-cha, Kang Choi, *ibid.*

<sup>62</sup> SSU (*Ship Salvage Unit*), unit pasukan kapal selam. Lihat [Half Century History of the ROK Navy](#)". [Republic of Korea Navy Official Website](#). March 4, 2007

<sup>63</sup> KDX (*Korean Destroyer eXperimental*), Kapal perusak Korea Selatan. Lihat *ibid.*

<sup>64</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 31.

militer yang dimiliki. Dalam menghadapi ancaman Korea Utara, angkatan bersenjata Korea Selatan memiliki personel dan peralatan yang lebih modern dibanding periode 1980-1990-an. Ditambah lagi dengan kehadiran pasukan Amerika Serikat.<sup>65</sup> Data-data susunan tempur Korea Selatan ditahun 1999 adalah :

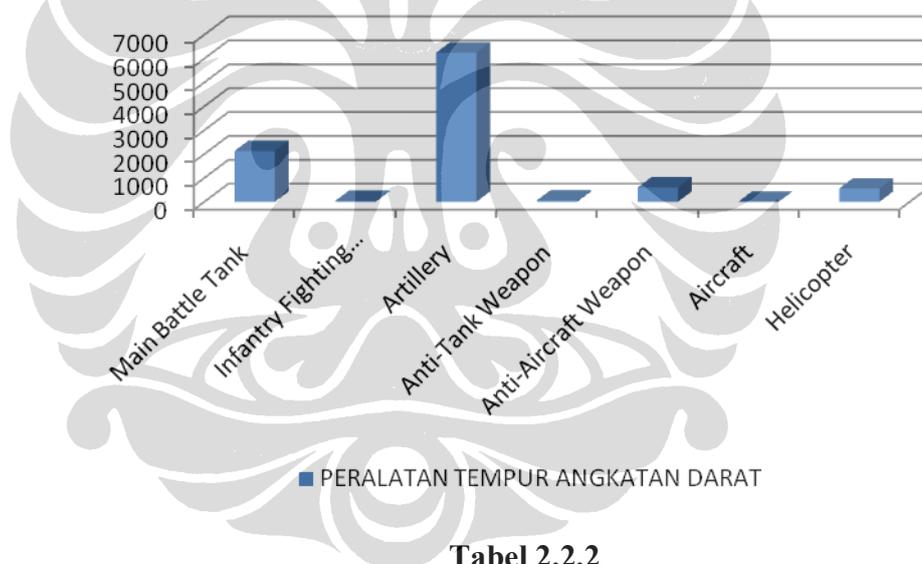
**Tabel 2.2.1**

**Kekuatan Personil Angkatan Darat Korea Selatan<sup>66</sup>**



**Grafik 2.2.4**

**Peralatan Tempur Angkatan Darat Korea Selatan<sup>67</sup>**



**Tabel 2.2.2**

**Kekuatan Personil Angkatan Laut Korea Selatan<sup>68</sup>**



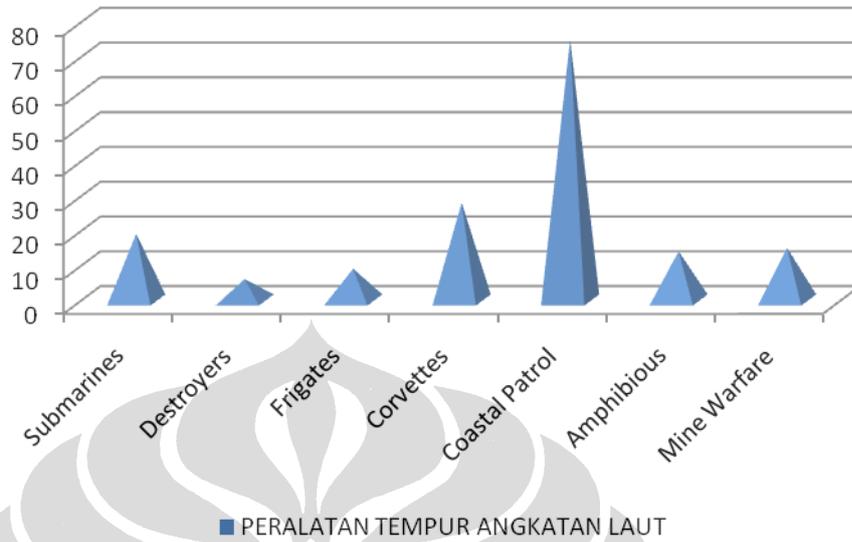
<sup>65</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1999-2000*, London: International Institute for Strategic Studies, h. 195.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 195-196.

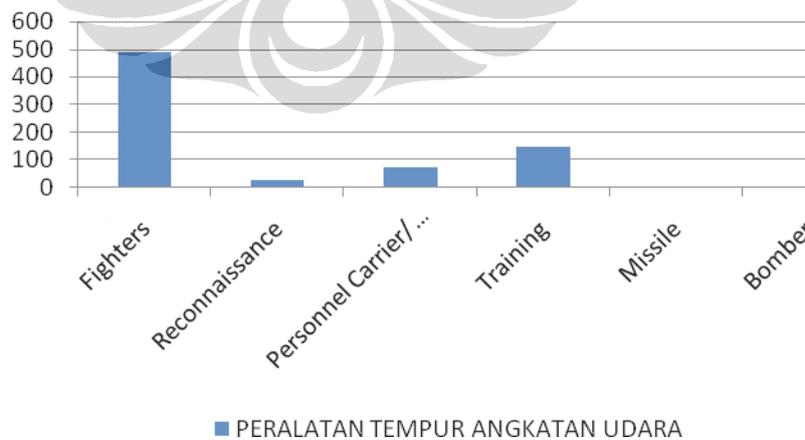
**Grafik 2.2.5**  
**Peralatan Tempur Angkatan Laut Korea Selatan<sup>69</sup>**



**Tabel 2.2.3**  
**Kekuatan Personil Angkatan Udara Korea Selatan<sup>70</sup>**



**Grafik 2.2.6**  
**Peralatan Tempur Angkatan Udara Korea Selatan<sup>71</sup>**



<sup>69</sup> *Ibid.*  
<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 196.  
<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 196.

Korea Selatan mempunyai strategi dasar dalam melaksanakan tujuan keamanan nasional, yaitu memelihara aliansinya dengan Amerika Serikat, memperkuat postur keamanan bebas dan meningkatkan persahabatan, hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di dalam maupun di luar kawasan sembari mencari koeksistensi damai dengan pihak Korea Utara. Inti dari strategi keamanan nasional dalam arahan strategi tersebut adalah :

1. Mencegah terjadinya perang dengan mempertahankan lingkungan keamanan yang stabil sembari menyelesaikan konfrontasi hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan. Dengan demikian dapat terbentuk pondasi untuk keamanan yang stabil.
2. Meningkatkan hubungan koeksistensi damai dengan cara rekonsiliasi dan kerjasama lebih jauh sambil menjamin keamanan nasional terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar dengan memperkuat kerjasama bilateral maupun multilateral.
3. Menciptakan kemakmuran yang sejalan dengan keamanan nasional terhadap ancaman dari luar dan dari dalam dengan cara memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral.<sup>72</sup>

Korea Selatan juga mempunyai tujuan pertahanan mereka dalam ruang lingkup tujuan keamanan nasional, yaitu :

1. Mempertahankan negara terhadap ancaman militer dari luar dan terhadap invasi.
2. Menjamin reunifikasi secara damai.
3. Menciptakan stabilisasi kawasan dan perdamaian dunia.<sup>73</sup>

Dalam mencapai tujuan pertahanan ini, ditentukan 4 arahan dasar, yaitu :

1. Diarahkan pada pertahanan nasional yang mempunyai kualitas tinggi.
2. Terus menciptakan kebijakan-kebijakan militer dalam upaya mengurangi ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea.

<sup>72</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 32.

<sup>73</sup> *Ibid.*

3. Meningkatkan aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat dan memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara kawasan.
4. Menciptakan kerjasama yang baik antara angkatan bersenjata dengan rakyat.<sup>74</sup>

Selain hal yang telah tersebut, Korea Selatan juga berupaya meningkatkan profesionalisme militer, angkatan bersenjata Korea Selatan secara rutin melaksanakan latihan gabungan, baik bersama Amerika Serikat, negara-negara lain maupun latihan internal angkatan bersenjata Korea Selatan. Latihan yang rutin dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Latihan *Ulchi Focus Lens* (UFL)
2. Latihan *Reception, Staging Onward Movement and Integration* (RSOI)
3. Latihan *Doksuri* (Foal-Eagle)
4. Latihan *Rim of the Pacific* (RIMPAC)
5. Latihan Komando Akhir, *Joint Chief of Staff* (JCS)
6. Latihan *Hokuk*.<sup>75</sup>

Angkatan bersenjata Korea Selatan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan latihan bersama dengan luar negeri guna meningkatkan kesiapan tempur yang terpadu. Disamping itu Korea Selatan juga aktif berperan dalam *Peace Keeping Operation* (PKO) dan kegiatan lainnya yang menunjang stabilitas regional.<sup>76</sup>

Angkatan bersenjata Korea Selatan melakukan kombinasi struktural dalam garis komando yang dinamakan *Combined Force Command* (CFC) dengan pihak Amerika Serikat. Dihalaman selanjutnya dapat dilihat gambar *Organizational Chart* antara angkatan bersenjata Korea Selatan dengan Amerika Serikat :

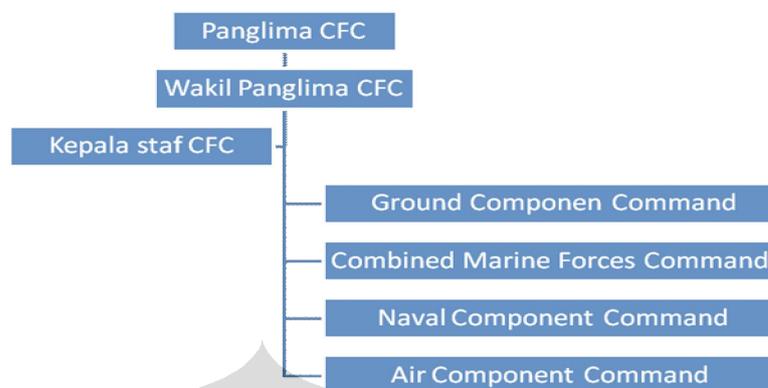
---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>76</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 148

Gambar 2.2.1

Organisasi *Combined Force Command* (CFC) Amerika Serikat - Korsel<sup>77</sup>

Pada posisi panglima, Amerika Serikat mengambil alih komando, penempatan hal tersebut memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat merupakan aktor yang selalu ingin menjadi pemimpin dalam peta kekuatan militer di dunia. Strategi Korea Selatan dalam menghadapi serangan mendadak dari Korea Utara yaitu, ditingkatkannya penggunaan sistem penginderaan dini dan pasukan reaksi cepat. Strategi operasinya adalah melakukan penghadangan dan menyerang lawan pada tempat masuknya. Kemudian mencegah infiltrasi musuh dan mengadakan hubungan dari garda depan ke belakang, serta melakukan serangan balasan dengan skala penuh.

## 1) Pasukan reaksi cepat

- Sistem komando operasi integrasi dengan memaksimalkan dan mengefektifkan sistem kombinasi operasi bersama.
- Menjaga terus integrasi sistem peringatan dini dan pengawasan bersama Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Guna menghadapi serangan mendadak, meningkatkan kesiapan tempur dan latihan-latihan operasi yang intensif dengan peralatan canggih serta memperkuat kesiapan tempur di garis perbatasan.
- Meningkatkan kemampuan pertahanan untuk menghadapi serangan rudal di garis depan dan belakang. Terus melakukan pengawalan intensif pada kedudukan rudal Korea Utara dan hadangan terhadap gerakan pesawat musuh.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 154.

- Guna menghadapi angkatan laut Korea Utara yang terus meningkat baik jumlah maupun penyebaran infiltran di malam hari, pesawat udara yang terbang rendah dan *Hovercraft* dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk pendaratan dan penyusupan. Untuk itu Korea Selatan meningkatkan kemampuan penjagaan dan pertahanan udara, laut dan darat melalui operasi bersama dengan Amerika Serikat serta sistem peringatan dini untuk laut dan udara.
- Untuk menghadapi serangan Korea Utara, Korea Selatan mengadakan pengawasan intensif dengan peralatan peringatan dini untuk mendeteksi serangan senjata kimia di garis depan dan belakang. Juga menyiapkan peralatan untuk melindungi penduduk sipil dan personel militer. Latihan-latihan pertahanan perang selalu dilakukan pada setiap tingkatan.<sup>78</sup>

Seoul yang berjarak hanya 40 km dari DMZ merupakan kota dan daerah paling rawan dalam sistem pertahanan Korea Selatan. Dengan demikian Seoul memiliki prioritas paling tinggi dalam rencana strategi dan operasi pertahanan nasional. Untuk pertahanan wilayah ibukota ini, dilakukan sistem penghadangan dan blokade pada pintu-pintu masuk utama dekat DMZ, Dalam waktu bersamaan disiapkan untuk perlawanan menghadapi musuh yang lewat jalan memutar atau unit-unit pasukan khusus, serangan udara dan artileri jarak jauh. Disamping itu juga meningkatkan kemampuan penduduk sipil seperti pertolongan medis, suplai air dan makanan, evakuasi dan sebagainya sambil membentuk organisasi unit-unit administrasi dengan kerjasama erat antara pemerintah militer dan sipil. Korea Utara akan menggelar strategi dengan kombinasi berbagai sistem perang. Diperkirakan bahwa unit-unit komando khusus untuk melaksanakan infiltrasi dalam skala besar lewat darat, udara dan laut untuk mencoba kesiapan dan kemampuan militer Korea Selatan. Pasukan-pasukan khusus ini berusaha untuk memacu dan mengintensifkan operasi di daerah-daerah front depan. Untuk menghadapi berbagai serangan Korea Utara di garis belakang. Angkatan bersenjata Korea Selatan menerapkan sistem pertahanan *multilayer* (berlapis).

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 149.

Dalam sistem pertahanan ini juga dibuat konsep-konsep operasi untuk berperang dalam daerah-daerah front depan dan belakang sekaligus.<sup>79</sup>

Secara geografis, Semenanjung Korea merupakan jembatan antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Wilayah perairan yang mengelilingi negara ini (Korea Selatan) adalah 12 mil laut, baik di sebelah timur, selatan maupun barat. Untuk melindungi perairan tersebut, Korea Selatan melaksanakan *Joint Operation Sea Areas* (JOSAs) = Kerjasama operasi laut untuk deteksi dini, identifikasi dan pengendalian kapal-kapal lawan yang masuk perairan teritorial. Korea Selatan juga membangun *Northern Boundary Line* (NBL) di Laut Timur dan *Northern Limit Line* (NLL) di Laut Kuning berdasarkan konsep *Demarcation Military Line* (DML) di darat yang ditetapkan oleh *United Nations Command* (UNC) pada tahun 1953.<sup>80</sup>

Untuk pertahanan udara, Korea Selatan membangun *Korea Air Defense Identification Zone* (KADIZ) dan *The Korea Air Defense Area* (KADA). KADIZ untuk mengidentifikasi dan mengendalikan pesawat udara dengan cepat. KADA untuk mengidentifikasi, penempatan dalam pengawasan dan pengendalian pesawat udara di daerah udara musuh. Batas geografi KADA di atas perairan sama dengan JOSA. Untuk mengidentifikasi pesawat udara yang memasuki wilayah udara Korea Selatan dan mencegah pesawat udara musuh, Korea Selatan mengoperasikan angkatan udara untuk melakukan pengawasan 24 jam dan sistem peringatan dini.<sup>81</sup>

Menurut Korea Selatan, Korea Utara banyak melakukan tindakan-tindakan provokasi dan cukup sering melakukan perang psikologis. Tindakan-tindakan provokasi yang berhasil Korea Selatan catat dari pasca perpecahan yang diantara keduanya hingga insiden terakhir di laut barat semenanjung Korea Selatan. Kejadian-kejadian yang dapat dicatat adalah sebagai berikut :

- 21 Juni 1968 : Serangan kilat ke *Blue House* (Istana Kepresidenan)
- 1968 : Infiltrasi ke Ulchin dan Samchok oleh pasukan khusus

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 150.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 151.

- 1976 : Pembunuhan terhadap perwira UNC di Panmunjom.
- 1983 : Pemboman di Makam Pahlawan Aungsan Rangoon, Myanmar dan pengeboman pesawat komersial KAL 858. Penggalan terowongan (4 buah) untuk infiltrasi dan perampokan kapal-kapal ikan di Laut Timur.
- Oktober 1995 : Penyusupan-penyusupan di Puyo dan Sungai Imjin
- 18 Sept 1996 : Penyusupan kapal selam mini Korut di pantai Kangnung.
- 15 Juni 1999 : Insiden Laut Barat<sup>82</sup>

Sedangkan dipihak Korea Utara, Korea Utara tidak pernah berhenti melakukan modernisasi kekuatan militernya. Dengan status negara yang keamanannya fluktuatif di tiap saat, Korea Utara terus menyiagakan kekuatan militernya untuk mengantisipasi ancaman perang agresi dari negara-negara yang mempunyai hubungan fluktuatif pula dengan Korea Utara, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang. Pentingnya posisi dan peranan militer di Korea Utara, yang tergabung dalam *People's Armed Forces* atau Tentara Rakyat Korea (TRK), merupakan salah satu kebijakan nasional yang dicetuskan oleh pemimpin besar Korea Utara, Marsekal Kim Jong-il, dengan nama kebijakannya adalah *Army-first Policy*. Peranan militer adalah salah satu kunci dari tiga kekuatan yang sering dipropagandakan di Korea Utara, selain ideologi *Juche* dan ilmu pengetahuan. Kesiapsiagaan militer di Korea Utara juga ditunjukkan dengan sikap aktifnya yang diwarnai dengan percobaan-percobaan peluncuran satelit dan dianggap oleh negara-negara yang berseberangan dengan Korea Utara sebagai peluru kendali. Peluncuran satelit itu antara lain, *Kwangmyongsong-I*. Selain itu sikap lain yang ditunjukkan Korea Utara adalah pertunjukan kekuatan TRK yang tiap tahun secara rutin menyelenggarakan peringatan hari berdirinya TRK yang diisi dengan parade dan *defile* kekuatan militer baik *manpower* ataupun *equipment* yang mereka miliki. TRK berada dibawah komando tertinggi komisi pertahanan nasional yang diketuai oleh Marsekal Kim Jong-il yang bertindak pula sebagai panglima tertinggi TRK, sementara yang bertindak sebagai menteri angkatan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

bersenjata di era milenium baru adalah *Vice-Marshal* Kim Il-chol.<sup>83</sup> Berdasarkan informasi statistik kekuatan angkatan bersenjata negara-negara di dunia. Kekuatan militer Korea Utara pada tahun 1999<sup>84</sup> akan dijelaskan pada tabel dan grafik berikut :

**Tabel 2.2.4**

**Kekuatan Personil Angkatan Darat Korea Utara<sup>85</sup>**



**Grafik 2.2.7**

**Peralatan Tempur Angkatan Darat Korea Utara<sup>86</sup>**



**Tabel 2.2.5**

**Kekuatan Personil Angkatan Laut Korea Utara<sup>87</sup>**



<sup>83</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (operasional)*, o.pcit., h. 125.

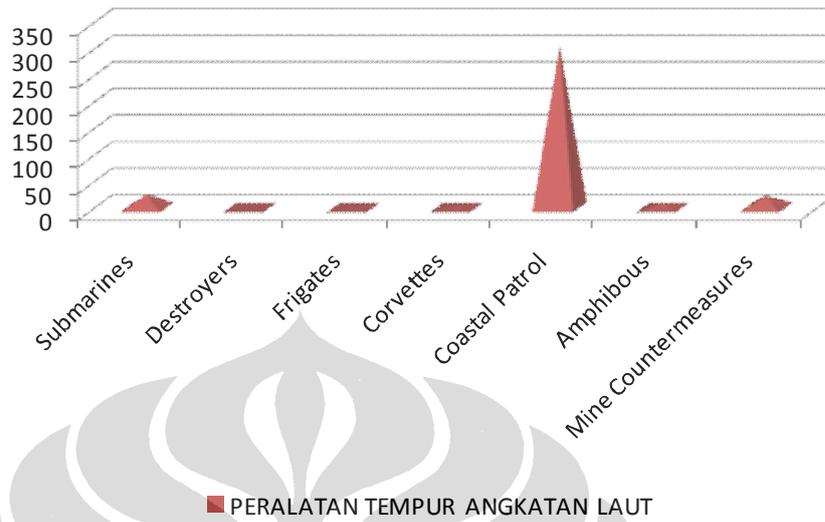
<sup>84</sup> Tahun 1999 merupakan fase tertinggi dalam ketegangan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, setelah terjadinya insiden laut barat diantara keduanya.

<sup>85</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1999-2000*, op.cit., h. 193-194.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 194.

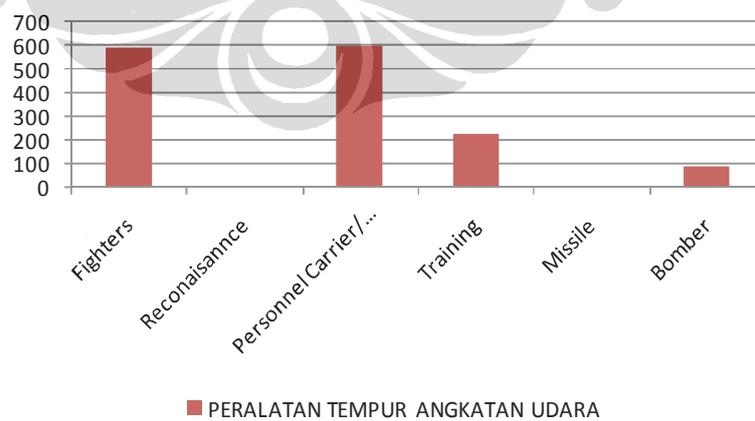
**Grafik 2.2.8**  
**Peralatan Tempur Angkatan Laut Korea Utara<sup>88</sup>**



**Tabel 2.2.6**  
**Kekuatan Personil Angkatan Udara Korea Utara<sup>89</sup>**

<b>AIR FORCE</b>
<b>86.000 Personnel</b>

**Grafik 2.2.9**  
**Peralatan Tempur Angkatan Udara Korea Utara<sup>90</sup>**



<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

Untuk peralatan dan persenjataannya, Korea Utara lebih menekankan pada modernisasi peledak-peledak jarak jauh yang dianggap lebih efektif. Pengembangan ini termasuk dalam mortir, artileri udara, MRL (Multiple Rocket Launcher), rudal *Frog-5*, *Frog-7* dan rudal *scud*. Rudal *scud B/C* telah diproduksi dengan beberapa modifikasi 100 buah per tahun, sejak Korea Utara mampu mengimpor rudal ini dari Mesir pada tahun 1980. Setelah mampu memproduksi, Korea Utara melakukan aktifitas ekspor rudal ini ke daerah Timur-Tengah, termasuk Syria, Iran, sehingga Korea Utara dianggap salah satu negara pengeksport rudal. Penjualan rudal ini untuk menopang ekonomi dalam negerinya yang menjadi ciri khas negara militer.<sup>91</sup>

### 2.3 Pasang Surut Hubungan Kedua Korea dalam dinamika politik-Internasional

Dalam era pasca berakhirnya Perang Dingin, regional Asia Pasifik masih mengalami ketidakpastian keadaan, terutama mengenai keadaan *Balance of Power* serta *Balance of Interest*. Hal lain yang juga membebani adalah munculnya berbagai macam permasalahan klasik yang telah diakhiri, namun kembali muncul. Teori penangkalan menjadi suatu langkah menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang kembali muncul tersebut di era ini. Dalam melakukan langkah tersebut, *Security Dilemma* memerlukan stabilitas produksi senjata, yang justru meningkatkan ketegangan. Hal itulah yang dilakukan oleh Korea Utara dengan program nuklirnya yang memang berawal dari pemikiran terhadap strategi penangkalan. Nuklir dianggap oleh Korea Utara sebagai alat politik yang dalam pandangan Korea Utara dapat membantu mereka dalam keadaan yang masih pada tahap ketidakpastian. Sikap Korea Utara ini merupakan reaksi dari kecurigaan mereka terhadap Amerika Serikat yang mulai menggunakan kebijakannya di arena semenanjung Korea.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (operasional)*, opcit., h. 125-126. Lihat juga KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, Seoul: KBRI Seoul, 2001, h. 127-128.

<sup>92</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik dan Perkembangan Kawasan Pasca-Perang Dingin*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjend DPR-RI, 2004, h. 55.

Selain itu pasca Perang Dingin pula, Rusia dan Cina (yang merupakan sekutu lama Korea Utara) telah menormalisasi hubungannya dengan Korea Selatan. Langkah kedua negara tersebut merupakan langkah realistis dalam melihat perkembangan dalam negerinya. Pasca runtuhnya Uni Soviet, negara yang kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Republik Rusia, tidak lantas bisa bebas dari hal-hal yang memberatkan begitu saja. Tetapi justru, mereka dibebani oleh krisis ekonomi yang sangat parah dalam sejarah perjalanan bangsa mereka. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan luar negeri untuk lepas dari hal tersebut. Normalisasi hubungan antara Rusia dan Korea Selatan pada tahun 1990 telah diikuti dengan pengucuran bantuan ekonomi dan berbagai kerjasama investasi lainnya. Sementara itu dalam usahanya untuk tetap melanjutkan reformasi ekonominya Cina mengambil langkah yang sama dengan Rusia. Normalisasi hubungan antara Korea Selatan-Cina dan Korea Selatan-Rusia merupakan tamparan keras bagi Korea Utara. Korea Utara merasa ditinggalkan oleh para sekutu tradisionalnya. Normalisasi hubungan kedua negara tersebut dengan Korea Selatan menjadikan Korea Utara makin terisolasi dari komunitas internasional. Hal ini makin diperparah dengan masalah dalam negeri berupa kekurangan pangan karena kesalahan kebijakan pertanian Korea Utara dan telah membuat mereka mengalami krisis pangan dan bencana kelaparan berkepanjangan yang menimpa rakyat Korea Utara. Untuk menutupi hal tersebut, Korea Utara mengembangkan senjata dan kemampuan mengelola reaktor nuklirnya dalam upaya untuk mempertahankan *bargaining position*-nya di semenanjung Korea, dan tindakan Korea Utara tersebut merupakan reaksi terhadap sistem yang berubah di lingkungannya.<sup>93</sup>

Namun dalam penulisan ini, isu nuklir Korea Utara ini tidak akan menjadi suatu yang deskriptif, akan tetapi justru akan menjadi dasar dari pembicaraan Seoul-Pyongyang dalam kerangka proses reunifikasi kedua Korea. Presiden Korea Selatan di era ini, yaitu Roh Tae-woo menginginkan suatu upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan pada bulan Juni 1988 untuk memperbaiki hubungan

---

<sup>93</sup> Keith R. Legg dan James F. Morrison, "The Formulation of Foreign Policy Objectives", dalam Richard Little dan Michael Smith (eds), *Perspective on World Politics*, second edition, Routledge 11 New Fetter Lane, London, 2000, h. 62.

antara Korea Utara dan Selatan yang mengalami ketegangan secara berkepanjangan. Upaya-upaya yang dilakukan pada bulan Juni tersebut adalah program *family reunification* (penyatuan kembali keluarga Korea yang terpisah), dibukanya ruang perdagangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta forum-forum pembicaraan tingkat internasional yang dianggap sangat penting dalam mempertemukan keduanya. Bahkan, Presiden Roh Tae-woo, mengangkat keinginannya tersebut dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya tersebut Presiden Korea Selatan yang terpilih di era tersebut, mengajak Korea Utara untuk membicarakan dan membahas isu-isu keamanan yang terdapat di semenanjung Korea.<sup>94</sup>

Dari sisi Korea Utara, negara Komunis ini mulai melakukan pengajuan untuk melakukan pertemuan politik secepatnya dalam membahas rencana reunifikasi dan mencapai kesepakatan perjanjian kedua belah pihak sebagai bagian dari metode reunifikasi. Bahkan di bulan September tahun 1989, kedua belah pihak mulai memikirkan rencana pertemuan keduanya, dan yang akhirnya terjadi pada bulan September tahun 1990 di Seoul.<sup>95</sup>

Situasi keamanan di semenanjung Korea pada tahun 1990 mulai bergerak menuju akhir persaingan antara Korea Utara dan Korea Selatan, walaupun ada ketegangan yang muncul dengan meninggalnya presiden Korea Utara Kim Il-sung pada tahun 1994 dan adanya isu nuklir dari Korea Utara. Korea Utara sendiri telah berusaha untuk membuka diri dalam usahanya menyelesaikan masalah ekonomi dan krisis diplomatiknya. Perjanjian Jenewa pada bulan Oktober 1994 antara Amerika Serikat dan Korea Utara merupakan titik balik dalam diplomasi Korea Utara mengupayakan mencari keuntungan ekonomi dan diplomasi, dengan persyaratan Korea Utara harus menghentikan program nuklirnya. Hal yang disadari oleh Korea Utara, adalah sangat sulit bagi Korea Utara untuk dapat berhasil dalam memelihara sistem yang keterbukaannya demikian terbatas, apalagi tanpa adanya tindakan-tindakan untuk merubah sistem dasarnya. Walau

<sup>94</sup> Steven Aftergood, *Nuclear Weapons Program-North Korea*, <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/index.html>, 9 Juni 2003, h. 3.

<sup>95</sup> Kim Byong Hong, Korean Reunification dalam *Proceedings of the Academy of Political Science*, Vol. 38, No. 2, "The China Challenge: American Policies in East Asia", The Academy of Political Science, 1991, h. 115.

demikian, Korea Utara mempunyai kemampuan yang cukup dalam bidang militer, baik dalam hal untuk meningkatkan ketegangan militer maupun dalam hal kemampuan melakukan agresi militer.<sup>96</sup>

Korea Utara pada kisaran tahun 1990-an meningkatkan usahanya untuk menjadi suatu negara yang kuat dengan meningkatkan kemampuan bidang militer, ideologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden Kim Jong-il yang menggantikan mendiang ayahnya meminta dan menekankan kepada rakyat Korea Utara pentingnya menjaga persatuan dan berusaha membangun suatu negara yang kuat dalam persenjataan, teknologi dan ilmu pengetahuan melalui pesan tahun baru. Mengenai hubungan Inter-Korea, Korea Utara menegaskan lagi garis kerasnya terhadap Korea Selatan dan mengesampingkan perkiraan kemungkinan pengadaaan kembali pembicaraan antar pemerintah yang tertunda. Korea Utara juga mengkritik negara-negara yang memusuhinya, terutama Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat mempunyai ambisi Imperialis yang beracun terhadap ideologi *Juche* (*Self Reliance*). Korea Utara saat ini mengalami kesulitan dalam memelihara sistem politiknya yang disebabkan oleh persoalan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengkhianat yang keluar dari Korea Utara. Dengan kebijakan militer dan strategi yang digariskan oleh presiden terdahulu, yaitu Kim Il-sung pada tahun 1994, dan krisis pangan yang melanda Korea Utara sebagai akibat banjir yang melanda Korea Utara secara berturut-turut tahun 1995 dan 1996. Meski, hal tersebut tidak dapat merubah kebijakan dan strategi anakhronistisnya, yaitu mengkomunikasikan seluruh semenanjung Korea dengan caranya sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya, Korea Utara tanpa ragu-ragu akan menggunakan kekuatan militer dan senjata nuklirnya, tetapi dilain pihak Korea Utara masih terikat pada perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat. Menyadari bahwa kekuatan militer adalah suatu cara yang paling ampuh untuk memelihara rezim politiknya dan untuk mengkomunikasikan seluruh semenanjung Korea. Oleh karena itu Korea Utara telah dan terus memperkuat angkatan bersenjataanya dengan menekankan prioritas utama pada pembangunan

---

<sup>96</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, Seoul: KBRI Seoul, 2000, h. 119.

pangkalan-pangkalan militer dan menumbuhkan semangat tempur pada setiap prajuritnya.<sup>97</sup>

Perkiraan mengenai masa depan Korea Utara cenderung menjadi ekstrim. Perkiraan pertama seperti yang terjadi pada bekas negara Uni Soviet dan rezim-rezim sosialis di Eropa Timur Laut, Korea Utara akan runtuh. Sebaliknya perkiraan kedua melihat bahwa rezim Pyongyang akan tetap bertahan dengan karakteristiknya yang unik. Korea Utara berbeda dengan negara-negara Eropa Timur, karena Korea Utara memelihara sistem Stalin secara ketat, tetapi disamping itu Korea Utara juga mengalami konflik-konflik sosial dan kesulitan ekonomi yang sama seperti yang pernah dialami oleh negara bekas negara-negara komunis Eropa Timur. Walaupun dalam hal ini kesulitan ekonomi yang dialami Korea Utara jauh lebih berat dari pada yang dialami negara-negara Eropa Timur.<sup>98</sup>

Masalah ekonomi mungkin merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial dalam kesadaran sosial rakyat Korea Utara. Kebutuhan utama sehari-hari didistribusikan melalui sistem ransum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sistem ransum tersebut dalam beberapa tahun ini telah mengalami hambatan-hambatan dan keterlambatan karena meningkatnya kesulitan ekonomi Korea Utara. Belakangan ini perubahan sosial yang cepat telah terjadi dan ini diluar jangkauan pengawasan pemerintah. Menurunnya ekonomi secara tiba-tiba dan runtuhnya blok sosialis pada akhir 1980-an, telah menyebabkan berkurangnya bahan makanan dan bahan pokok yang lain. Rakyat Korea Utara saat ini harus mencari suatu cara untuk mengatasi kekurangan bahan makanan, karena mereka tidak lagi dapat mengandalkan ransum dari pemerintah dan sebagai hasilnya kesadaran sosial mereka mulai berubah. Ketidakpercayaan rakyat Korea Utara pada pemerintah dapat dilihat dalam dua bentuk, yang pertama dimanifestasikan dalam bentuk kritik langsung terhadap sistem ransum, yang lainnya muncul dalam bentuk pasar gelap. "Pasar Kedua" ini menjadi penting karena ia dapat menyediakan kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Munculnya pasar gelap ini menunjukkan bahwa elemen-elemen kapitalis telah diperkenalkan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 121.

ke dalam sistem distribusi. Kurangnya bahan makanan dan kebutuhan lain dapat didefinisikan sebagai masalah ekonomi, tetapi perubahan yang terjadi dalam cara mendapatkan barang menunjukkan adanya perubahan dalam sistem itu sendiri. Sistem ransum yang merupakan salah satu pilar dari kehidupan ekonomi Korea Utara saat ini sedang goyah, bahkan beberapa pengamat menyatakan bahwa sistem tersebut sudah runtuh. Ketika rakyat mempunyai pengalaman bahwa membeli kebutuhan di pasar gelap dan mendapat untung melalui partisipasi langsung dalam perdagangan, maka persepsi mereka mengenal nilai uang mulai berubah secara drastis. Individualisme dan materialisme segera muncul sebagai suatu sistem nilai. Materialisme, termasuk pandangan baru terhadap uang, suap sedang menancapkan akarnya di Korea Utara.<sup>99</sup>

Diawali dengan langkah dialog yang positif, pertemuan tingkat menteri antar kedua negara menjadi suatu awalan yang baik bagi hubungan keduanya. Pertemuan tersebut melahirkan dua kesepakatan yang dianggap penting oleh keduanya, yaitu *Reconciliation Agreement*, Meniadakan Agresi, dan melakukan kegiatan *Exchange* serta *Cooperation* diantara keduanya di berbagai bidang. Kesepakatan pertama ini merupakan basic agreement yang diteruskan dengan *Joint Declaration* yang berisi tentang kesepakatan menghapus kebijakan nuklirisasi di semenanjung Korea. Dua perjanjian ini berhasil ditandatangani pada akhir tahun 1991 oleh kedua belah pihak.<sup>100</sup>

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan juga semakin mencair, setelah dibentuknya Organisasi yang dinamakan *Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO), disini Korea Selatan bahu membahu bersama Amerika Serikat dan Jepang melakukan pengadaan energi air untuk membantu kebutuhan Korea Utara. Pembentukan organisasi ini sendiri merupakan hasil dari kesepakatan dalam *Agreed Framework* tahun 1994.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 121-122

<sup>100</sup> Steven Aftergood, *op.cit.*, h. 2. Lihat juga Kim Byong Hong, *ibid.*

<sup>101</sup> Larry A. Niksch, *North Korea's Nuclear Weapons Program*, CRS Issue Brief for Congress, Congressional Research Service, 27 Agustus 2003, h. 10. Lihat juga International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance : 1999-2000*, *op.cit.*, h. 172.

Memasuki tahun 1998, atau tepatnya di akhir bulan Agustus. Hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan kembali memanas, hal ini dikarenakan tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba rudal Jarak Jauh, yang mereka namakan *Taepo Dong-1*. Peluncuran tersebut menimbulkan kekhawatiran kembali, baik disemenanjung Korea maupun dikawasan Asia Timur.<sup>102</sup>

Pada tanggal 15 Juni 1999, pukul 7 pagi, 10 kapal patroli AL Korea Utara dan tiga kapal torpedonya menyusup masuk ke daerah penyangga perbatasan lautt sampai 5 km ke dalam wilayah perairan Korea Selatan, 13 km berat laut pulau Yangpyong mengawal 20 kapal nelayan Korea Utara. Sedangkan kapal patroli AL Korea Selatan yang sudah sejak tanggal 9 Juni 1999 mengawasi gerak kapal-kapal AL Korea Utara berupaya untuk mengusir sambil membentur tiga kapal patroli AL Korea Utara agar kembali ke perairan wilayah mereka sendiri (NLL). Pada pukul 09.25 pagi satu dari kapal patroli AL Korea Utara tersebut menembak kapal patroli AL Korea Selatan dengan senjata *canon 25 mm* yang kemudian dibalas oleh kapal patroli AL Korea Selatan. Dalam tembak-menembak selama 5 menit satu kapal torpedo Korea Utara berbobot mati 40 ton tenggelam dan diperkirakan 10 orang ABK-nya tewas, sementara 5 kapal patroli AL Korea Utara lainnya mengalami rusak berat dan kembali ke daerah perbatasan (NLL). Dipihak AL Korea Selatan 7 orang prajurit mengalami luka-luka dan 5 kapal patroli AL Korea Selatan mengalami kerusakan. Partai oposisi GNP menilai Kim Dae-jung telah gagal menerapkan *sunshine policy* terhadap Korea Utara. Kim dianggap terlalu lembek dalam menghadapi Korea Utara mengingat bantuan-bantuan yang dikirimkan ke Korea Utara berasal dari Korea Selatan sebagai timbal baliknya Korea Utara membalasnya dengan provokasi militer.<sup>103</sup>

Perundingan tingkat Wakil Menteri Korea Selatan - Korea Utara dibuka kembali tanggal 22 Juni 1999 di Beijing setelah tertunda satu hari dari rencana semula tanggal 21 Juni 1999 karena Korea Utara melakukan protes atas penundaan pengiriman 100 ribu ton pupuk ke kepada mereka. Ketua delegasi Korea Selatan Yang Young-shik yang juga merupakan wakil menteri unifikasi,

<sup>102</sup> Murray Hiebert, John Larkin dan Susan Lawrence, *North Korea: Consequence of Confession*, Far Eastern Economic, 31 Oktober 2002, h. 14-16.

<sup>103</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000*, *op.cit.*, h. 46-48.

dalam perundingan tersebut mengatakan bahwa sekarang ini waktunya bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi rasa kesedihan bagi keluarga kedua Korea yang terpisah dan mengusulkan agar Korea Utara dapat mengizinkan keluarga Korea yang terpisah untuk mengetahui sanak keluarganya jika masih hidup dan dapat mengirim surat serta mengadakan pertemuan. Meminta Seoul dan Pyongyang mendirikan kantor penghubung seperti yang telah dituangkan dalam isi *Basic Agreement* kedua Korea 1992.<sup>104</sup>

Park Yong-su pejabat senior komite unifikasi perdamaian tanah air yang memimpin delegasi Korea Utara, tidak memberikan jawaban terhadap masalah pertemuan tersebut dan sebaliknya mengecam Korea Selatan atas insiden saling menembak yang terjadi di Laut Barat tanggal 15 Juni 1999 serta menuntut Seoul agar menyatakan permintaan maaf dan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kemudian kedua pihak saling tuduh-menuduh atas insiden tersebut dan akhirnya perundingan mengalami jalan buntu karena kedua pihak tetap pada posisinya masing-masing. Pada perundingan berikutnya tanggal 2 Juli 1999, juga mengalami jalan buntu setelah delegasi Korea Utara *walkout* dari meja perundingan dan mengancam akan memboikot pertemuan selanjutnya kecuali Seoul meminta maaf atas insiden kapal perang di Laut Barat dan segera mengirimkan pupuk kepada Pyongyang.<sup>105</sup>

Suhu politik hubungan kedua negara semakin memanas dengan ditahannya seorang turis asal Korea Selatan Min Yong-mi pada tanggal 20 Juni 1999 yang sedang melakukan perjalanan wisata ke gunung Kumgang. Otoritas hukum Korea Utara menuduh Min melakukan kegiatan spionase dan menghasut pemandu wisata Korea Utara untuk membelot ke Korea Selatan. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyampaikan protes keras kepada Korea Utara dan menuntut Pyongyang agar segera membebaskan warganya serta meminta Hyundai untuk menghentikan semua operasi kapal pesiarnya ke Korea Utara. Dengan adanya instruksi tersebut maka satu dari tiga kapal pesiar *Hyundai* yang kebetulan baru tiba pagi hari tanggal 21 Juni 1999 di pelabuhan Changjwon, Korea Utara, pada

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 48-49.

malam harinya kembali ke pelabuhan Tonghae, Korea Selatan. Menindaklanjuti instruksi Dewan Keamanan Nasional, *Hyundai* menghentikan pembayaran tiap bulan kepada Korea Utara sebesar US\$ 8 juta serta mempertimbangkan untuk menarik semua pejabat-pejabat *Hyundai* yang ada di Korea Utara. Untuk sementara pemerintah Korea Selatan menghentikan wisata ke gunung Kumgang dan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara.<sup>106</sup>

*Hyundai Group* sebagai penyelenggara wisata ke Gunung Kumgang dan yang bertanggung jawab terhadap penahanan Min Yong-mi terus berupaya melakukan perundingan dengan Komite Perdamaian Tanah Air Korea Utara untuk membebaskannya. Berkat upaya-upaya keras *Hyundai Group*, akhirnya pada tanggal 25 Juni 1999 Min Young-mi dibebaskan dari penahanan dan kembali ke Seoul didampingi oleh pejabat *Hyundai Group*.<sup>107</sup>

Ketegangan di semenanjung Korea kembali meningkat dikarenakan kegiatan provokatif dan infiltrasi Korea Selatan terhadap Korea Utara di bulan Juni 1999. Korea Selatan yang diperintahkan Amerika Serikat dalam menjalankan misi invasinya ke Korea Utara yang berlatarkan kekalahan mereka di Perang Korea (1950-1953). Infiltrasi Korea Selatan ke wilayah perairan Korea Utara memunculkan insiden yang dinamakan insiden laut barat. Korea Utara merasa sangat dipermainkan oleh pihak Korea Selatan dan Amerika Serikat, melalui perundingan tanggal 2 Juli 1999 di Panmunjom yang dihadiri oleh para perwira tingkat tinggi Korea Utara dengan Amerika Serikat yang masing-masing dipimpin oleh Letjen Ro Chan-bok dan Mayjen Michael Dunn. Dalam perundingan tersebut delegasi militer Korea Utara mengulangi kecamannya atas infiltrasi militer Korea Selatan ke perairan Korea Utara dan sekaligus mengecam pihak Amerika Serikat yang secara sepihak telah menetapkan “Garis Batas Utara” atas wilayah perairan yang dianggap daerah netral dalam persetujuan Gencatan Senjata tahun 1953. Pada kesempatan tersebut delegasi militer Korea Utara mengajukan lima tuntutan, yakni :

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>107</sup> *Ibid.*

- Pihak militer Amerika Serikat harus segera membatalkan penetapan sepihak “Garis Batas Utara”.
- Militer Amerika Serikat harus ditarik mundur dari wilayah perairan yang dipersengketakan tersebut.
- Gangguan dan provokasi terhadap daerah perairan Korea Utara harus segera dihentikan.
- Para pelaku tindakan provokatif dalam insiden 15 Juni yang lalu harus dijatuhi hukuman.
- Mengusulkan disetujuinya prinsip-prinsip persetujuan untuk mencegah konflik kekuatan laut di daerah laut barat Korea pada tingkat perwira tinggi dan mendiskusikan masalah-masalah praktis sebagai implementasinya dalam dalam pembicaraan terpisah.

Pihak militer Amerika Serikat menolak tuntutan Korea Utara tersebut dengan menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut daerah perairan yang dimaksud harus dirundingkan oleh Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>108</sup>

Korea Utara menjawab penolakan Amerika Serikat tersebut, bagi Korea Utara tuntutan yang mereka kemukakan tersebut terkait dengan persetujuan gencatan senjata karena fungsi berbagai forum Inter-Korea seperti “dialog utara-selatan” dan komisi militer bersama Utara-Selatan dianggap Korea Utara telah mengalami kemacetan. Pihak militer mengemukakan bahwa “Garis Batas Utara” yang ditetapkan secara unilateral tidak memerlukan persetujuan kedua pihak dan akan tetap ada hingga tercapainya garis demarkasi baru di daerah perairan barat tersebut. Akan tetapi Korea Utara menegaskan sekali kepada pihak militer Amerika Serikat, bahwa bila Amerika Serikat benar-benar menginginkan peredaan ketegangan di semenanjung Korea, maka pihak Amerika Serikat harus mempertimbangkan secara positif usul dari delegasi militer Korea Utara seperti yang telah ditekankan pada perundingan Panmunjom.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (Operasional)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2000, h. 136-141.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 142.

Namun ketegangan kembali mereda di akhir tahun 1999, ketika lagi-lagi Korea Utara melunak dengan Amerika Serikat dan bersedia melakukan penandatanganan perjanjian moratorium pelaksanaan uji coba rudal jarak jauhnya.<sup>110</sup>

Surat kabar milik partai buruh komunis Korea Utara *Rodong Sinmun* dalam editorialnya memberitakan :

- Pemerintah Korea Utara tanggal 14 Maret 2000 secara resmi dapat menerima usul Presiden Kim Dae-jung untuk membuka kembali dialog tingkat pejabat tinggi antar kedua Korea jika Korea Selatan menunjukkan sikap perubahan yang positif dan sungguh-sungguh.
- Korea Utara berkeinginan untuk mengadakan dialog dari hati kehati untuk membicarakan isu *pending* yang ada di antara kedua Korea.
- Berupaya mewujudkan reunifikasi nasional dengan Korea Selatan, jika Seoul benar-benar mengubah kebijakan konfrontasinya.
- Pemerintah Seoul pertama harus menghapuskan undang-undang keamanan nasional dalam mengakhiri kebijakan koordinasi anti Pyongyang yang selama ini dijalin dengan sekutunya dan menjamin kebebasan aktivis pro-Korea Utara di Korea Selatan.<sup>111</sup>

Pada grafik dibawah terlihat hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang mengalami pasang surut dalam periode-periode seperti, pada tahun 1945-1950, wilayah semenanjung Korea yang diduduki oleh Jepang pada masa perang dunia II dan dilepaskan pasca kekalahan Jepang. Tahun 1950-1953 merupakan awal perpecahan semenanjung Korea menjadi dua wilayah dalam perang saudara yang disebut Perang Korea. Di tahun 1960-1980, masing wilayah-wilayah telah mengalami perpecahan dan masing-masing wilayah telah mempunyai ideologinya masing-masing, yang dimana Korea Utara berideologi Komunis dan Korea Selatan berideologi Demokrasi Liberal akibat pengaruh dari dua polar besar dunia pasca Perang Dingin, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tahun 1980-1992, merupakan tahun persaingan kekuatan militer antara Korea

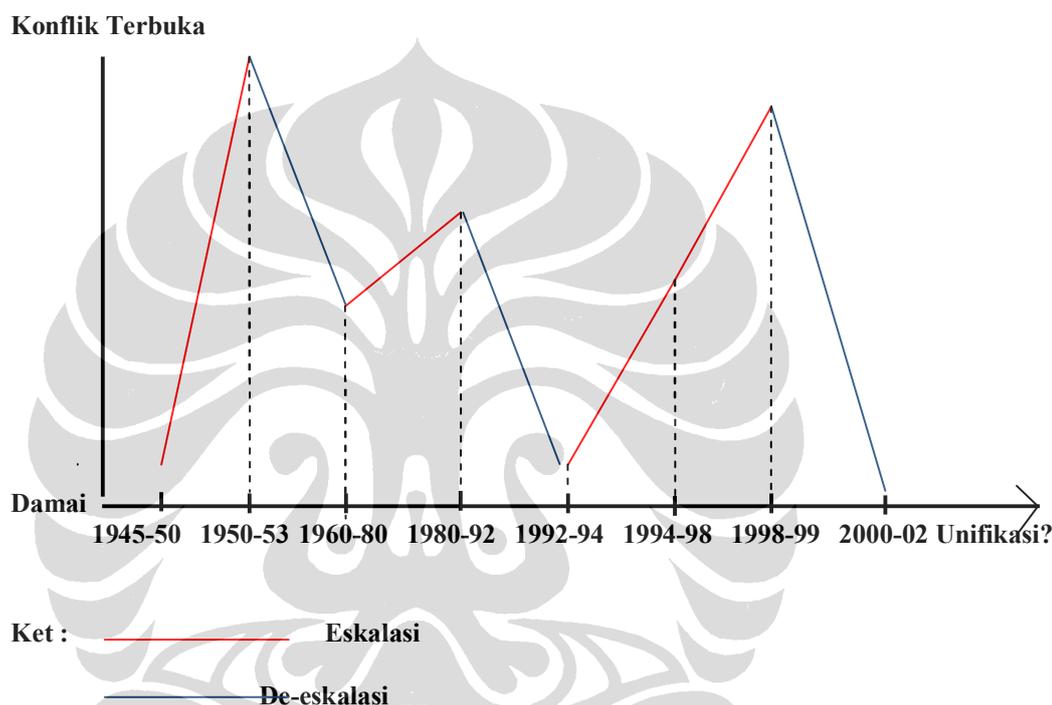
<sup>110</sup> Murray Hiebert, John Larkin dan Susan Lawrence, *op.cit.*, h. 14-16.

<sup>111</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000*, *op.cit.*, h. 52-53.

Utara dengan Korea Selatan, namun pada tahun tersebut Korea Utara mengungguli kekuatan militer Korea Selatan, dikarenakan pada saat itu Korea Selatan mengalami krisis ekonomi dan tindakan-tindakan represif terjadi yang sering menimbulkan percikan konflik.<sup>112</sup>

**Grafik 2.3.1**

**Pasang Surut Hubungan kedua Korea dalam  
Dinamika Politik Internasional**



Tahun 1992-1994 merupakan tahun penurunan ketegangan diantaranya keduanya yang dimana, di tahun tersebut kedua Korea menandatangani *Basic Agreement* yang menempatkan keduanya pada proses penyelesaian konflik, hingga berujung pada *Agreement Framework* antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang mengharuskan Korea Utara melakukan gencatan senjata dan memelihara perdamaian di semenanjung Korea. Tahun 1994-1998 hubungan keduanya kembali memburuk, bahkan cenderung naik ke potensi permasalahan besar di tahun 1998-1999, yang dimana Insiden Laut Barat<sup>113</sup> merupakan salah

<sup>112</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1983-1984*, London: The International Institute for Strategic Studies, 1983, h. 93-94.

<sup>113</sup> Insiden laut barat adalah pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Selatan pada tanggal 7 Juni 1999

satu pertempuran terbuka diantara keduanya. Memasuki milenium baru, hubungan kedua kembali mencair dengan upaya-upaya Korea Selatan menciptakan perdamaian diantara keduanya serta mengangkat isu reunifikasi. Di tahun 1999-2000, Korea Utara menurunkan egonya demi mendapatkan bantuan dari Korea Selatan dalam berbagai hal yang mereka butuhkan, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan dan kebutuhan energi. Di tahun 2000 pula, terjadinya pertemuan tingkat tinggi antara dua pemimpin besar kedua Korea yang dinamakan KTT Inter-Korea pada tanggal 13-15 Juni 2000 dan keduanya mulai mengambil langkah-langkah menuju proses reunifikasi.

#### 2.4 Intervensi asing yang terus menanamkan pengaruhnya - di Semenanjung Korea

Perpecahan dan ketegangan yang ada antara Korea Selatan dan Korea Utara masih terus berlanjut diperiode ini. Karena kunci penyelesaian kedua hal tersebut, sebenarnya bukan hanya berada pada kedua negara yang bersengketa, dalam hal ini Korea Utara dan Korea Selatan. Akan tetapi juga sangat banyak dipengaruhi oleh negara-negara kuat lainnya, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang.

Proses pencairan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan juga diwarnai oleh campur tangan Amerika Serikat dalam berbagai kegiatan yang didasari oleh kewaspadaan terhadap kegiatan Korea Utara yang kembali melakukan pengaktifan program nuklirnya dan penolakan-penolakan terhadap himbuan badan-badan yang bergerak dalam kerjasama dan kegiatan analisa nuklir, seperti *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan *Joint Nuclear Control Commission* (JNCC) yang akhirnya JNCC sendiri mengalami kegagalan

---

dengan memasuki perairan Korea Utara dan bahkan melabuhkan sembilan kapal perangnya di pulau-pulau kecil Syongphyong dan Taechong, di wilayah perairan Korea Utara. Bahkan di tanggal 8 Juni, keesokan harinya Korea Selatan terus menambah armada lautnya tersebut dan berbalik arah setelah bertemu dengan kapal patroli Korea Utara. Aksi yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut merupakan aksi provokasi dan infiltrasi bagi Korea Utara, dan hal tersebut dinilai oleh Korea Utara merupakan perintah Amerika Serikat yang ingin melakukan invasi ke wilayah Korea Utara. Kegiatan ini dianggap Korea Utara merupakan pelanggaran berat atas persetujuan gencatan senjata 1953. Bahkan aksi pemicu peperangan dilakukan oleh kapal-kapal *destroyer* Korea Selatan tersebut pada tanggal 15 Juni 1999 terhadap kapal-kapal Korea Utara dan mengakibatkan hancurnya kapal-kapal perang Korea Utara di daerah perairan laut barat. Lihat KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 46-48.

dalam menahan niat Korea Utara.<sup>114</sup> Pada bulan Juni 1994, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter berkunjung ke ibukota Korea Utara, Pyongyang, untuk melakukan seruan agar kedua Korea yang kembali berseteru pasca tahun 1991, untuk melakukan dialog peredaan ketegangan diantara keduanya.<sup>115</sup>

Upaya Amerika Serikat tersebut terbilang cukup sukses karena berhasil menggiring Korea Utara ke dalam pertemuan Amerika Serikat-Korea Utara di Jenewa, Swiss pada tanggal 21 Oktober 1994, yang menghasilkan *Agreed Framework* (Kerangka Perjanjian) antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Kesediaan Korea Utara tersebut dibalas dengan kebijakan Amerika Serikat yang melepas sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Korea Utara, seperti dibukanya kembali akses ekonomi, komunikasi dan perbankan yang sebelumnya dibekukan oleh Amerika Serikat.<sup>116</sup>

Dalam upaya mencegah Korea Utara melakukan uji coba rudal *Taepodong II*, Menlu AS, William Cohen pada tanggal 29 Juli 1999 di Seoul mengadakan pertemuan koordinasi dengan Menhan Korea Selatan, Cho Seong-tae. Dalam pernyataannya, Menhan Cohen mengancam jika Korea Utara tetap melakukan uji coba peluncuran rudal balistik maka Pyongyang akan terisolasi dari masyarakat internasional dan sanksi ekonomi yang lebih keras lagi, karena uji coba tersebut akan merusak rencana perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Menlu Korea Utara, Paek Nam-sun dalam sidang umum PBB ke 54 di New York tanggal 24 September 1999, menyampaikan keputusan pemerintahnya untuk menengguhkan uji coba peluncuran rudal *Taepodong-II*, namun sebaliknya Korea Utara juga menginginkan agar Amerika Serikat juga menghormati hak kedaulatan negaranya dan menghentikan kebijakan permusuhan. Presiden Kim Dae-jung juga meminta agar Cina dapat memainkan peranannya untuk mencegah Korea Utara agar tidak melakukan rencananya. Sedangkan Amerika Serikat dan Jepang tetap meningkatkan kerjasamanya untuk mengakhiri struktur perang dingin yang masih melekat di kawasan Semenanjung Korea. Selain itu, Korea Selatan juga

---

<sup>114</sup> Larry A. Niksch, *op.cit.*, h. 10.

<sup>115</sup> Robert Scalapino, Seizaburo Sato, Jusuf Wanandi (ed.), *op.cit.*, h. 60.

<sup>116</sup> *Ibid.*

berkeinginan untuk meningkatkan jarak tempak rudalnya menjadi 500 km guna meng – *counter* ancaman rudal Korea Utara.<sup>117</sup>

Bagi Amerika Serikat, penempatan pasukan mereka di Korea Selatan mempunyai arti strategis karena dengan demikian pasukan Amerika Serikat akan selalu dapat digerakan secara cepat jika terdapat situasi *contingency* di kawasan Asia Pasifik. Pada periode ini, *interest* Amerika Serikat terhadap Korea Selatan bukan semata-mata pada masalah keamanan saja tetapi telah meluas pada masalah ekonomi.<sup>118</sup>

Untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea serta pembentukan struktur hidup berdampingan secara damai antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 15 September 1999, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Perry, dalam laporannya pada kongres Amerika Serikat menyampaikan kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara, antara lain sebagai berikut:

- Normalisasi hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan mencabut sanksi ekonomi dengan jaminan Korea Utara tidak meneruskan program nuklirnya dan menghentikan uji coba peluncuran rudalnya.
- Amerika Serikat harus mengakhiri struktur perang dingin di Semenanjung Korea dengan membantu Korea Selatan, Korea Utara dan Jepang dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mengurangi permasalahan yang ada di kawasan.
- 37.000 pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan harus tetap dipertahankan dan perjanjian “*Agreement Framework*” antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pada tahun 1994 di Jenewa harus tetap dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah Korea Utara mengembangkan program senjata nuklirnya.
- Kebijakan baru Amerika Serikat melalui pendekatan yang komprehensif dan konsisten terhadap Korea Utara, serta memelihara hubungan dalam *trilateral coordination and oversight group*, sebagai

<sup>117</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 50.

<sup>118</sup> *Ibid.*

saluran dialog tingkat tinggi antara Seoul, Washington dan Tokyo untuk menyatukan persepsi dan kebijakan terhadap Korea Utara.

- Meminta kongres Amerika Serikat agar memberi dukungan terhadap paket usul perdamaian yang dibuat pemerintah Clinton untuk mencegah kemungkinan provokasi militer Korea Utara.<sup>119</sup>

Di pihak lain, negara seperti Jepang yang notabene merupakan negara yang mempunyai perekonomian terkuat di Asia, khususnya Asia Timur, mempunyai perhitungan terhadap Korea Selatan sebagai saingan yang perlu diperhatikan secara perkembangan dalam bidang ekonomi. Jepang sendiri memperhitungkan bagaimana meningkatnya kekuatan kedua Korea, jika bersatu. Gabungan sinergi persatuan (unifikasi) dari dua kekuatan tersebut diperkirakan dapat mampu menyaingi Jepang, dengan demikian analisa terhadap faktor negatifnya, pihak Jepang akan berada posisi untuk tidak menyetujui unifikasi kedua Korea dalam waktu dekat.<sup>120</sup>

Sedangkan bagi Cina, sebagai negara yang dalam waktu sekitar 10 tahun mendatang diperkirakan akan menjadi negara *Superpower* dan merupakan sekutu tradisional bagi Korea Utara, maka sudah pasti mereka akan menempatkan diri dipihak yang berseberangan dengan pihak Amerika Serikat. Hal ini mengingat terpecahnya kedua Korea dalam perbedaan ideologi dan pandangan, tak lain karena persetujuan dua negara besar ini, sehingga diperkirakan dalam kritis Cina tidak akan meninggalkan Korea Utara. Selain itu, Cina yang merasa berkedudukan sama dengan pihak Amerika Serikat, maka Cina akan selalu menunjukkan kepada dunia luar dan juga kepada Amerika Serikat bahwa Cina adalah negara *super power* yang sulit didikte oleh pihak Amerika Serikat.<sup>121</sup>

Hubungan tradisional dan historis Korea Utara dengan Cina tetap dekat dan akan berlanjut dengan baik, apalagi setelah runtuhnya Uni Soviet maka hubungan tersebut lebih dekat lagi karena Cina-lah negara yang sangat diandalkan untuk membantu Korea Utara yang terus menerus dilanda kesulitan ekonomi.

<sup>119</sup> *Ibid.*,

<sup>120</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 34.

<sup>121</sup> *Ibid.*

Untuk itu maka pejabat-pejabat baik Korea Utara maupun Cina tetap melakukan kegiatan saling berkunjung,<sup>122</sup> bahkan banyak pengusaha-pengusaha Cina yang berdomisili di Korea Utara untuk mensuplai bahan atau barang-barang yang diperlukan Korea Utara.

Untuk Rusia, yang merupakan sekutu tradisional Korea Utara dan pada periode ini mulai menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, walaupun masih terdapatnya hambatan-hambatan seperti adanya kasus saling mengusir perwakilan negaranya (korps diplomatik) dan dikecewakannya Korea Selatan karena Rusia menolak ketika Korea Selatan meminta agar pelarian Korea Utara yang melewati daerah Rusia agar diserahkan kepada Korea Selatan. Masih bersikap menunggu dan mengamati situasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, sikap hati-hati ini ditunjukkan Rusia karena situasi perekonomian mereka sendiri kurang baik.<sup>123</sup>

Sedangkan dengan Korea Utara, sejak usainya perang dingin dan bubarnya Uni Soviet maka hubungan Korea Utara dengan Rusia mengalami titik terendah, ditambah dengan pembukaan hubungan diplomatik Rusia-Korea Selatan yang dianggap Korea Utara sebagai pengkhianatan hubungan tradisional diantara keduanya yang telah terjalin puluhan tahun lamanya. Karena pada awalnya, setelah bubarnya Uni Soviet dan Rusia berdiri, negara baru tersebut tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara sekutu Uni Soviet, salah satunya Korea Utara yang banyak mendapat bantuan ekonomi dan teknologi dari negara tersebut. Namun di pertengahan berdirinya negara Rusia, Rusia juga mengalami kesulitan ekonomi dan beberapa tahun terakhir di penghujung abad 20 boleh dikatakan tidak ada bantuan ekonomi yang datang dari Rusia. Untuk memulihkan kembali hubungan tradisional kedua negara, maka beberapa pejabat tinggi mulai melakukan kunjungan ke Korea Utara, seperti kunjungan Presiden Rusia Vladimir

---

<sup>122</sup> Seperti kunjungan terakhir pemimpin besar Korea Utara, Marsenal Kim Jong-il ke Cina pada tanggal 29-31 Mei 2001 dalam rangka memenuhi undangan sekretaris jenderal komite sentral Partai Komunis Cina, Jiang Zemin, yang juga presiden RRC. Kedua belah pihak mengadakan tukar pikiran mengenai kemajuan dan perkembangan hubungan tradisional kedua Negara dan kedua partai (PKC & PPK) serta kehendak untuk lebih mengembangkan hubungan tersebut khususnya dalam pembangunan sosialisme dimasa depan. Kedua Negara juga selain bertukar pikiran sekitar hubungan bilateral kedua Negara dan kedua partai, Korea Utara juga membicarakan perihal rencana berlangsungnya KTT Inter-Korea di Pyongyang yang direncanakan pada tanggal 12-14 Juni 2000. Lihat KBRI Seoul, Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti), *op.cit.*, h. 6-7.

<sup>123</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 34.

Putin ke Pyongyang pada tanggal 10-20 Juli 2000. Pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana bersahabat dan akrab tersebut, telah dibicarakan berbagai hal menyangkut situasi dalam negeri masing-masing serta mendiskusikan upaya-upaya dalam mengembangkan dan memperluas hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara khususnya tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama, yaitu keamanan wilayah Asia Timur dan semenanjung Korea. Pertemuan dan pembicaraan antara Vladimir Putin dan Kim Jong-il tersebut diakhiri dengan menandatangani sebuah "*Joint Declaration*" yang isi pokoknya adalah pernyataan sikap kedua negara yang menentang dan mengutuk terorisme internasional, kesepakatan untuk mulai menjalin kembali kerjasama ekonomi, penegasan sikap untuk mempertahankan perjanjian "*Anti-Balistic Missile*", menyambut dan mendukung hasil-hasil KTT Inter-Korea tanggal 13-15 Juni 2000, serta keinginan membina hubungan persahabatan, bertetangga baik sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara kedua negara tanggal 9 Februari 2000, serta kerjasama dalam bidang-bidang IPTEK, budaya dan pendidikan.<sup>124</sup>

Kunjungan presiden Rusia ini mempunyai arti penting bagi kedua negara karena ini merupakan kunjungan pertama pemimpin tertinggi Rusia sejak terpecahnya Uni Soviet. Dengan terjadinya kunjungan ini, kiranya pemerintah Korea Utara mengharapkan hubungan historis antara kedua negara yang sempat "dingin" dapat kembali ditingkatkan. Dapat pula dikatakan bahwa Korea Utara tengah memperkuat posisinya baik dalam aspek politik dan militer dengan mendekati Rusia yang pada saat bersamaan ingin kembali menempatkan dirinya sebagai salah satu aktor kunci dalam perimbangan strategis (politik dan militer) di semenanjung Korea dan Asia Timur pada umumnya. Upaya kearah ini nampak semakin dekatnya Rusia dan Cina serta diikuti pula dengan bergabungnya Korea Utara. Dalam konteks perimbangan kekuatan di kawasan hal ini kiranya dapat dilihat sebagai sebuah aliansi segitiga baru (Rusia-Cina-Korea Utara) yang diindikasikan bermaksud mengimbangi aliansi Amerika Serikat Jepang dan Korea Selatan yang terlebih dahulu mapan. Dalam kaitannya dengan KTT Inter-Korea

---

<sup>124</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2000: Jilid II (Periode April – Desember 2000)*, op.cit., h. 39-40.

beberapa waktu lalu, kedekatan Korea Utara dengan Rusia dan Cina pada yang bersamaan menunjukkan bahwa Korea Utara ingin meningkatkan pengaruhnya pada saat berhadapan dengan Korea Selatan maupun dengan Amerika Serikat dan Jepang.<sup>125</sup>

Hubungan Korea Utara dengan Jepang selalu diwarnai oleh dinamika yang sangat beragam, meskipun tetap diisi oleh berbagai rektorika, namun pada tahun 2002 hubungan diantara kedua sedikit mencair ketika perdana menteri Junichiro Koizumi dengan pemimpin besar Korea Utara, Marsekal Kim Jong-il, pada bulan September 2002 melakukan pertemuan di Pyongyang, Korea Utara yang pada akhir pertemuan kedua pemimpin menandatangani sebuah Deklarasi Bersama yang secara resmi dinamakan sebagai *The DPRK-Japan Pyongyang Declaration*.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>126</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2002: Buku II (Kegiatan Operasional)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2002, h. 26-27.